

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	Terwujudnya Program dan Tata Kelola Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi di KEK yang Berdaya Saing				
1.1	Tingkat Capaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Administrator KEK	%	85%	22%	22%
2	Terwujudnya Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Mendukung Pemberian Fasilitas dan Kemudahan yang Berkualitas				
2.2	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	skala	3 (skala 4)	3,31	82,75%
3	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Hukum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana yang Berkualitas				
3.1	Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Hukum, Analisis dan Pelaksanaan Advokasi Hukum	%	90%	24%	24%
3.2	Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	%	90%	24%	24%
4	Terwujudnya Tata Kelola di Unit Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK				
4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Tugas Pemberian Dukungan Teknis dan Administrasi Program dan Tata Kelola di Lingkungan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	%	85%	22%	22%
4.2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	%	>85%	7.38%	86.9%

Kinerja Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Program dan Tata Kelola Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi di KEK yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Kegiatan yaitu terwujudnya program dan tata kelola hukum, sumber daya manusia dan organisasi di KEK yang berdaya saing ditunjukkan dengan indikator Tingkat Capaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Administrator KEK.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Tingkat Capaian
Pembentukan dan
Penetapan
Kelembagaan
Administrator KEK**

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kompetitif dan berkelanjutan, dibutuhkan tata kelola hukum, sumber daya manusia (SDM), dan organisasi yang kuat, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Penguatan program-program strategis yang berbasis regulasi yang jelas dan progresif menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkeadilan di setiap KEK.

Tata kelola hukum yang efisien dan akuntabel memastikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha, serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pengembangan SDM yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil, yang mampu menjawab tantangan global dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi organisasi, dibutuhkan kelembagaan yang responsif, terkoordinasi, dan berbasis kinerja, sehingga mampu mendorong efektivitas implementasi kebijakan dan pelayanan publik di KEK. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem KEK yang terintegrasi dan kompetitif di tingkat regional maupun global.

Melalui strategi penguatan hukum, SDM, dan organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan KEK mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di era transformasi digital dan globalisasi saat ini.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85% penetapan target tahun 2025 berdasarkan pada rencana kerja tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga triwulan I tahun 2025, target

yang telah terealisasi sebesar 22% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Capaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Administrator KEK	%	85%	22%	22%

Kebijakan pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK bertujuan untuk penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian operasional yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus, tingkat capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan penyelesaian pembentukan dan penetapan dengan jumlah keseluruhan rencana pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

$$\% \text{ Tingkat Capaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Administrator KEK} = \left(\frac{\text{Total Penyelesaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan KEK}}{\text{Total Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan KEK yang direncanakan}} \right) \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk memonitor tingkat capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan administrator KEK. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Capaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Administrator KEK			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Pelaksanaan capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK

Pada proses Pelaksanaan capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam proses tercapainya pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK, diantaranya pembahasan tata cara kerja administrator KEK dalam pemberian perizinan kepada badan usaha dan pelaku usaha, dan pembahasan potensi kolaborasi dalam mendukung penerapan SNI ISO 22301:2019 tentang sistem manajemen keberlangsungan usaha di KEK sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi kawasan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam kegiatan pelaksanaan capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dapat berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

2

Terwujudnya Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Mendukung Pemberian Fasilitas dan Kemudahan yang Berkualitas

Pencapaian sasaran kegiatan yaitu terwujudnya tata kelola Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang baik yang dituangkan dalam indikator berupa persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Biro hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks kepuasan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan prima, diperlukan sinergi antara layanan hukum yang responsif, sumber daya manusia yang kompeten, serta organisasi yang adaptif dan berdaya saing. Layanan hukum yang kuat dan proaktif menjadi fondasi dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh kebijakan fasilitasi. Di sisi lain, penguatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan dan pelayanan dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Organisasi yang efektif, dan efisien juga menjadi penggerak utama dalam menyelenggarakan layanan yang terintegrasi, inklusif, serta mampu menjawab tantangan dinamika global dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan sistem hukum, pengembangan SDM berkelanjutan, serta restrukturisasi organisasi yang adaptif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung pemberian fasilitas dan kemudahan yang berkualitas tinggi.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kawasan Ekonomi Khusus untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target indeks kepuasan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada tahun 2025 yaitu 3 (skala 4) berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks kepuasan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Skala	3 dari 4	3,31	82,75%

Indeks kepuasan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah instrumen untuk mengukur kepuasan layanan yang diberikan oleh Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi dengan melakukan identifikasi terkait layanan ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan penyusunan perundang-undangan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survey pelayanan ke Biro lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang dihitung dalam sebuah formula perhitungan berikut :

$$\text{Nilai Kepuasan} = \left(\frac{\text{Mean Jawaban dari Masing - Masing Item Survey}}{\sum \text{Item Survey}} \right)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar indeks kepuasan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Indeks kepuasan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Peningkatan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Terlaksana	Survey Peningkatan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi telah terlaksana.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I, Tahun 2025 Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi telah melakukan penyusunan survey layanan dan koordinasi, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan biro. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan indeks kepuasan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam kegiatan peningkatan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dapat berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

3

Terlaksananya Koordinasi Perumusan Hukum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi perumusan hukum, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi tata laksana yang berkualitas ditunjukkan dengan indikator persentase penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, analisis dan pelaksanaan advokasi hukum dan persentase penyelesaian evaluasi dan penyusunan instrumen pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase

Penyelesaian
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan,

Latar Belakang

Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan konsep, harmonisasi dengan peraturan yang relevan, serta koordinasi dengan pihak-

Pendapat Hukum,
Analisis dan
Pelaksanaan Advokasi
Hukum

pihak terkait guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip kejelasan rumusan, keterbukaan, dan partisipasi.

Pemberian pendapat hukum dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang timbul di lingkungan instansi, baik berkaitan dengan pelaksanaan tugas maupun dalam menyikapi persoalan hukum yang lebih kompleks. Pendapat hukum yang diberikan disusun secara profesional dengan memperhatikan ketentuan hukum positif, asas hukum umum, serta doktrin dan yurisprudensi yang relevan.

Selain itu, kegiatan analisis hukum juga telah dilakukan terhadap berbagai dokumen, kebijakan, serta perjanjian kerja sama guna memastikan kesesuaian substansi dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencegah potensi risiko hukum di kemudian hari.

Dalam hal pelaksanaan advokasi hukum, langkah-langkah strategis dilakukan melalui pendampingan hukum terhadap unit kerja, pemberian saran dalam penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta keterlibatan aktif dalam proses hukum guna melindungi kepentingan hukum institusi secara menyeluruh.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan target yang telah ditetapkan. Diharapkan, pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 90% penetapan target tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, target yang telah terealisasi sebesar 24% dari target Tahun 2025 sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Hukum, Analisis dan Pelaksanaan Advokasi Hukum	%	90%	24%	24%

Pada Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melaksanakan koordinasi dalam perubahan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK. Dalam penyelesaian indikator kinerja, terdapat peraturan pelaksana yang menjadi delegasi langsung kepada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, tetapi terdapat juga peraturan yang harus dikoordinasikan lintas sektor antar K/L. Dimana persentase penyelesaian ini bertujuan untuk memonitor penyelesaian peraturan dan regulasi dalam mendukung pertumbuhan KEK yang berdaya saing, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

$$\% \text{Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Hukum, Analisis dan Pelaksanaan Advokasi Hukum} \\ = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan dokumen hukum}} \right) \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk memonitor penyelesaian peraturan dan regulasi dalam mendukung pertumbuhan KEK yang berdaya saing. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Hukum, Analisis dan Pelaksanaan Advokasi Hukum			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Koordinasi Penyelesaian Peraturan Pelaksana PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Koordinasi Penyelesaian Peraturan Pelaksana PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK
2	Penyusunan regulasi penyelenggaraan KEK	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Penyusunan regulasi penyelenggaraan KEK

Pada proses pengembangan KEK, terdapat kebijakan yang dibuat untuk menyempurnakan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai pedoman untuk penyelenggaraan KEK. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK. Dalam penyempurnaan dan perubahan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Sekretariat Jenderal

Dewan Nasional KEK melalui Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas untuk mengakomodir proses perubahan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai kelembagaan.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yang dikerjakan untuk mendukung target kinerja Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Hukum, Analisis dan Pelaksanaan Advokasi Hukum. Sampai dengan bulan Maret 2025, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah melakukan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Harmonisasi 5 (lima) RPP tentang KEK dan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa, selain itu telah dilakukan pembahasan struktur organisasi Administrator KEK, dan rapat Pembahasan Tata Cara kerja Administrator KEK Dalam Pemberian Perizinan Kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha. Kemudian telah dilakukan Audiensi Pembahasan Kebijakan Regulasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam kegiatan penyelesaian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dapat berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

3.2. Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Latar Belakang

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap struktur organisasi dan tata laksana yang berlaku, guna menilai kesesuaian antara beban kerja, fungsi, dan struktur unit kerja. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan maupun restrukturisasi, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan yang berlaku.

Dalam aspek pengelolaan kepegawaian, telah disusun berbagai instrumen pendukung seperti analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, serta dokumen kebutuhan formasi yang diperbarui. Penyusunan instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sedangkan dalam bidang tata laksana, dilakukan penataan terhadap prosedur kerja dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta integrasi antarunit kerja. Penataan ini juga diarahkan pada upaya simplifikasi proses, digitalisasi layanan internal, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi penguatan kinerja organisasi secara menyeluruh serta mendukung terciptanya birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 90% penetapan target tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, target yang telah terealisasi sebesar 24% dari target Tahun 2025 sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	%	90%	24%	24%

Dalam rangka penyelesaian penyelesaian evaluasi dan penyusunan instrumen pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dilakukan beberapa kegiatan. Dimana persentase penyelesaian ini bertujuan untuk memonitor penyelesaian evaluasi dan penyusunan instrumen pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

Membandingkan jumlah penyelesaian dokumen evaluasi instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan, meliputi:

- Evaluasi struktur organisasi yang tepat fungsi (25%)
 - Evaluasi kebutuhan pegawai: (50%)
 - Perencanaan kebutuhan jabatan fungsional (10%)
 - Perencanaan kebutuhan perpindahan ke jabatan fungsional (10%)
 - Perencanaan kebutuhan kenaikan jabatan fungsional (10%)
 - Perencanaan kebutuhan pengadaan ASN (10%)
 - Penyusunan dan penyesuaian peta jabatan (10%)
 - Evaluasi jabatan fungsional (25%)
- Dengan seluruh target instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan kemudian dikalikan 100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk meningkatkan Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggaraan KEK. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penataan Sumber Daya Manusia di KEK	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Penataan Sumber Daya Manusia di KEK
2	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di KEK	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di KEK

Sepanjang Triwulan I Tahun 2025, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah melakukan beberapa rapat terkait penyelesaian evaluasi dan penyusunan instrumen pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, di antaranya adalah rapat pembahasan peta jabatan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, rapat pengisian usulan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, pembahasan pengumuman akhir pengadaan CPNS dan optimalisasi formasi CPNS TA 2024, bimbingan teknis penggunaan Aplikasi E-Kinerja dan persiapan pengusulan penetapan NIP, penentuan TMT CPNS TA 2024, dan pembekalan CPNS TA 2024, penyerahan perpanjangan perjanjian kerja PPPK, melakukan koordinasi pembahasan masa perpanjangan penugasan administrator KEK, serta koordinasi rekomendasi penugasan PNS Provinsi Aceh pada administrator KEK Arun Lhokseumawe

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam kegiatan penyelesaian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Ekonomi Khusus dapat berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik

kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana

4

Terwujudnya Tata Kelola di Unit Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Pencapaian Sasaran Kegiatan yaitu terwujudnya program dan tata kelola hukum, sumber daya manusia dan organisasi di kek yang berdaya saing ditunjukkan dengan indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Tugas Pemberian Dukungan Teknis dan Administrasi Program dan Tata Kelola di Lingkungan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Tugas Pemberian Dukungan Teknis dan Administrasi Program dan Tata Kelola di Lingkungan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan peran strategis unit pendukung yang mampu memberikan layanan teknis dan administratif secara optimal. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi merupakan unsur penting dalam struktur kelembagaan yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan aspek hukum, kepegawaian, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan dinamika perubahan kebijakan, tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan biro tersebut menjadi semakin tinggi. Hal ini mencakup tidak hanya penyediaan layanan yang cepat dan tepat, tetapi juga kemampuan dalam menyusun kebijakan teknis, mendukung pelaksanaan program prioritas, serta memastikan setiap proses administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian dukungan teknis dan administrasi oleh Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menjadi elemen kunci dalam menjamin konsistensi pelaksanaan program, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas penyelenggaraan fungsi-fungsi kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pada bidang ini menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat tata kelola internal, mendukung kinerja unit kerja lainnya, serta menciptakan sistem birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85% penetapan target tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, target yang telah terealisasi sebesar 22% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-4.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Tugas Pemberian Dukungan Teknis dan Administrasi Program dan Tata Kelola di Lingkungan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	%	85%	22%	22%
--	---	-----	-----	-----

Pada Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melaksanakan koordinasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan biro hukum, sumber daya manusia dan organisasi. Dalam penyelesaian indikator kinerja, terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dimana persentase penyelesaian ini bertujuan untuk memonitor kualitas pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan biro hukum, sumber daya manusia dan organisasi, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

Membandingkan jumlah penyelesaian tugas dan fungsi Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, meliputi:

- Urusan ketatausahaan (25%)
- Urusan kepegawaian (25%)
- Hubungan masyarakat (25%)
- Penyusunan peraturan perundang-undangan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi (25%)

Dengan seluruh target instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan kemudian dikalikan 100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk memonitor kualitas pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan biro hukum, sumber daya manusia dan organisasi. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Tugas Pemberian Dukungan Teknis dan Administrasi Program dan Tata Kelola di Lingkungan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyusunan rencana kegiatan Biro Hukum, Sumber Daya	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Penyusunan rencana kegiatan Biro

	Manusia, dan Organisasi		Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
--	-------------------------	--	--

Sepanjang Triwulan I Tahun 2025, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah melakukan beberapa kegiatan terkait penyusunan rencana kegiatan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi diantaranya, melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi E-Kinerja dan persiapan pengusulan penetapan NIP dan penentuan TMT CPNS T.A. 2024 dan pembahasan peta jabatan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam kegiatan penyelesaian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dapat berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

4.2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kualitas pelaksanaan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan mampu direalisasikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, pengelolaan anggaran tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis kelembagaan.

Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi memiliki mandat untuk mengelola fungsi-fungsi strategis yang mendukung keberlangsungan struktur dan sistem organisasi, penguatan regulasi internal, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan biro ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas, termasuk penyusunan regulasi, pengembangan kapasitas SDM, penataan organisasi, dan tata laksana.

Dalam menghadapi tuntutan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Kualitas pelaksanaan anggaran yang baik juga mencerminkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan negara,

serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menjadi suatu keharusan, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, target yang telah terealisasi sebesar 7,38% dari target Tahun 2025 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.2 Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	%	>95%	7,38%	86,9%

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian evaluasi dan penyusunan instrumen pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dilakukan beberapa kegiatan. Dimana persentase penyelesaian ini bertujuan untuk memonitor penyelesaian evaluasi dan penyusunan instrumen pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

$$\text{Indeks Tata Kelola (Tn) Perencanaan dan Pembentukan KEK} = (\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%)$$

$$\bullet \text{ Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran SP2D}}{\text{Target Tahunan}} \times 100\%$$

$$\bullet \text{ Capaian Output} = \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI dan E - Money}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian evaluasi dan penyusunan instrumen pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

4.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyusunan rencana anggaran	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Penyusunan rencana anggaran

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran dari serangkaian kegiatan Layanan Program dan Tata Kelola Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 yang hingga pada bulan Maret 2025 anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp130.054.500,00 atau sekitar 7,38% dari anggaran kegiatan yang diberikan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target


Sepanjang pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025, kendala yang umum ditemui pada pelaksanaan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah terbatasnya jumlah SDM yang tidak selaras dengan beban kerja, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses alokasi anggaran di Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan untuk seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang berupa blokir anggaran, memiliki dampak terhadap pola kerja serta sarana pendukung di Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Oleh karena itu, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi berupaya untuk terus memperbaiki agar kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi dapat mencapai target yaitu dengan melaksanakan penyempurnaan norma, standar, pedoman pendukung penyempurnaan penyelenggaraan KEK, penyelesaian masalah di KEK, penyusunan regulasi penyelenggaraan KEK, penyusunan laporan peraturan dan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas Badan Usaha, Pelaku

Usaha dan Administrator KEK, penyusunan laporan peningkatan kapasitas SDM
KEK dan penyusunan laporan penyerapan anggaran.

Jakarta, 14 April 2025

Kepala Biro Hukum, Sumber
Daya Manusia, dan
Organisasi



Muksin

NIP. 197203201998031008